

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025



Rencana Perubahan

Dinas Perhubungan
Kab. Tanah Laut





S A L I N A N

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 100.3.3.2/ 824 -KUM/2025

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah selaras dengan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu penetapan Keputusan Bupati untuk menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2025 –

2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 12);

22. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 39);
23. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 34);
24. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 69);
25. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat:
- a. pendahuluan;
 - b. evaluasi renja sampai dengan triwulan I tahun berkenaan;
 - c. rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah; dan
 - d. penutup.
- KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagai pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum

Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
(Perubahan KUA dan PPAS) Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Pelayhari
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Tanah Laut yang terletak pada ujung Selatan Pulau Kalimantan dimana berbatasan dengan laut pemisah Pulau Jawa dan Kalimantan serta berbatasan pula dengan Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu. Mengingat semakin berkembangnya usaha pertambangan, pertanian, perkebunan dan peternakan maka sangat berpotensi untuk dikembangkan Pelabuhan Nasional yang dapat mendistribusikan SDA tersebut keluar daerah, luar propinsi maupun luar negeri dengan modal transportasi laut.

Selain itu, Kabupaten Tanah Laut yang juga berbatasan langsung dengan Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar yang merupakan sentral ekonomi dan perdagangan di Propinsi Kalsel serta Kabupaten Tanah Laut yang merupakan jalur Trans Kalimantan pesisir selatan – timur maka hal ini menyebabkan arus lalu lintas orang dan barang dengan menggunakan moda transportasi darat untuk mendistribusikan hasil SDA di atas semakin lama akan semakin berkembang.

Untuk mendukung hal tersebut di atas maka diperlukan suatu rencana Kerja (RENJA) SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan yang mendasari penyusunan Renja SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Tahun Laut 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 5 ayat 3;
- c. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 150 ayat 3;
- d. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
- e. Permendagri nomor 13 tahun 2006 dan Permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



- f. Permendagri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan PP nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
- g. Permendagri nomor 23 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;
- h. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- i. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 114 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
- l. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- m. Surat Sekretaris Daerah Nomor : 000.7.3/830/P2EPD/Bspprrida, tentang Penyusunan Perubahan Renja SKPD Tahun 2025.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Adapun maksud dari penyusunan Renja SKPD ini adalah sebagai alat bantu pada setiap bidang serta unit kerja agar secara konsisten dan konsekuen menyelenggarakan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja SKPD ini adalah terselenggaranya program dan kegiatan prioritas sesuai dengan Visi dan Misi yang telah dituangkan dalam Renstra SKPD dan RPD Tanah Laut.

1.4. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Renja ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud Dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V. Penutup

BAB II

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Dinas melaksanakan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, namun ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan sebagaimana yang direncanakan.

Dalam rencana kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 telah ditetapkan 3 Program 17 Kegiatan dan 37 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 42.133.368.482,95 (*Empat Puluh Dua Milyar Seratus Tiga Puluh Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Dua Koma Sembilan Puluh Lima Rupiah*), dengan uraian capaian kinerja sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Sub kegiatan ini berisi belanja penggandaan (fotocopy) dan penjilidan.

Jumlah pagu anggaran Rp. 1.703.061,9. realisasi keuangan s/d Triwulan I sebesar Rp. 0,00 dengan progress 0%

1.1.2 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sub kegiatan ini berisi belanja kertas cover, penggandaan (fotocopy) dan penjilidan.

Jumlah pagu anggaran Rp. 1.764.519,9. realisasi keuangan s/d Triwulan I sebesar Rp. 0,00 dengan progress 0%.

1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Sub kegiatan ini berisi belanja gaji dan tunjangan ASN, iuran Jaminan Kesehatan ASN, iuran Jaminanl Kecelakaan Kerja ASN, iuran Jaminan Kematian ASN, iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN, dan Belanja Tambahan Penghasilan ASN. Jumlah pagu anggaran Rp. 6.045.103.666,00. realisasi keuangan s/d Triwulan I sebesar Rp. 1.431.992.548,00 dengan progres 23,69%.

1.2.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD

Sub kegiatan ini berisi belanja jasa transaksi keuangan. Jumlah pagu anggaran Rp. 1.182.183,8 realisasi keuangan s/d Triwulan I sebesar Rp. 0.

1.3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.3.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.

Sub kegiatan ini berisi Belanja alat listrik seperti : baterai, isolasi, kabel, lampu, dan stop kontak.

Jumlah pagu anggaran Rp. 8.002.557,00 realisasi keuangan s/d Triwulan I sebesar Rp. 7.018.000,00. dengan progress 87,70%.

1.3.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Belanja ATK, peralatan & perlengkapan kantor dan belanja modal seperti : Meja, kursi , laptop, dan printer.

Jumlah pagu anggaran Rp. 79.351.276,02 realisasi keuangan s/d Triwulan I sebesar Rp. 48.279.975,00 dengan progress 60,84%.

1.3.3 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

Belanja penggandaan / fotocopy.

Jumlah pagu anggaran Rp. 7.956.480,00 realisasi keuangan s/d Triwulan I sebesar Rp. 2.200.000,00 dengan progress 27,65%.



- 1.3.4 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Langganan Surat Kabar Barito Pos dan Surat Kabar Radar Banjarmasin.
Jumlah pagu anggaran Rp. 2.400.000,00 realisasi keuangan s/d Triwulan I sebesar Rp. 480.000,00 dengan progress 20%.
- 1.3.5 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan / Material
Belanja bahan untuk kegiatan pameran Anggrek dan pameran hari jadi Kabupaten Tanah Laut.
Jumlah pagu anggaran Rp. 15.000.000,00 realisasi keuangan s/d Triwulan I sebesar Rp. 0.
- 1.3.6 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Belanja makan minum rapat, makan minum tamu, perjalanan dinas luar daerah dan perjalanan dinas dalam kota.
Jumlah pagu anggaran Rp. 98.695.000,00 realisasi keuangan s/d Triwulan I sebesar Rp. 43.085.974,00 dengan progress 43,66%.
- 1.4 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- 1.4.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
Belanja tagihan telepon, air, dan belanja tagihan listrik.
Jumlah pagu anggaran Rp. 151.500.000,00 realisasi keuangan s/d Triwulan I sebesar Rp. 31.672.839,00 dengan progress 20,91%.
- 1.4.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
Honorarium PTT (Petugas Keamanan, Petugas Kebersihan, petugas sopir, Tenaga Teknis dan Tenaga Administrasi lainnya), dan belanja luran Jaminan/Asuransi bagi Non ASN.
Jumlah pagu anggaran Rp. 2.292.375.960,00 realisasi keuangan s/d Triwulan I sebesar Rp. 416.250.984,00 dengan progress 18,16%.

1.5 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

1.5.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Belanja pemeliharaan kendaraan dinas pejabat.

Jumlah pagu anggaran Rp. 31.000.000,00 realisasi keuangan s/d Triwulan I sebesar Rp. 3.393.000,00 dengan progress 10,95%

1.5.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2

Jumlah pagu anggaran Rp. 259.000.000,00 realisasi keuangan s/d Triwulan I sebesar Rp. 35.188.100,00 dengan progress 13,59%.

1.5.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Pemeliharaan AC, HT, Laptop, PC, printer dan scanner.

Jumlah pagu anggaran Rp. 20.000.000,00 realisasi keuangan s/d Triwulan I sebesar Rp. 6.000.000,00 dengan progress 30%.

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan (LLAJ).

2.1 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

2.1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota.

Belanja BBM, pengadaan suku Cadang APJ/PJU, Traffic Cone, perjalanan dinas, Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan (PDL), Marka, Pembayaran Listrik APJ/PJU, Pemeliharaan alat angkutan kendaraan bermotor penumpang, Pemeliharaan alat angkutan kendaraan bermotor angkutan barang, Pemeliharaan alat angkutan kendaraan bermotor beroda dua, Pemeliharaan alat angkutan kendaraan bermotor beroda tiga, Rambu lintas darat lainnya, Zona Aman Selamat Sekolah (ZOSS), Pengadaan dan pemasangan APJ/PJU lengkap.

Jumlah pagu anggaran Rp. 24.551.709.221,49 realisasi keuangan s/d Triwulan I sebesar Rp. 2.805.206.605,00 dengan progress 11,43%.



2.1.2 Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan.

Belanja Rehabilitasi/Pemeliharaan halte, pengadaan Walking Measure dan Perjalanan dinas.

Jumlah pagu anggaran Rp. 110.688.000,00 realisasi keuangan s/d Triwulan I sebesar Rp. 1.020.000,00 dengan progress 0,92%.

2.2 Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

2.2.1 Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota.

Sub kegiatan ini berisi Belanja Alat perlengkapan dinas, makan minum aktivitas lapangan, pakaian dinas lapangan, honor tim kegiatan, honor membantu pengamanan lalu lintas, , perjalanan dinas, dan belanja Handy Talky.

Jumlah pagu anggaran Rp. 365.311.130,00 realisasi keuangan s/d Triwulan I sebesar Rp. 53.060.000,00 dengan progress 14,52%.

2.2.2 Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota.

Sub kegiatan ini berisi Belanja makan minum Forum LLAJ.

Jumlah pagu anggaran Rp. 7.200.000,00 realisasi keuangan s/d Triwulan I sebesar Rp. 0,00.

2.2.3 Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini berisi Belanja banner / spanduk, makan minum aktivitas lapangan, perjalanan dinas, dan belanja peralatan untuk aktivitas lapangan.

Jumlah pagu anggaran Rp. 53.565.202,08 realisasi keuangan s/d Triwulan I sebesar Rp. 17.498.800,00 dengan progress 32,67%.

2.3 Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota

2.3.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin

Sub kegiatan ini berisi Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, dan perjalanan dinas,



Jumlah pagu anggaran Rp. 9.531.558,00 realisasi keuangan s/d Triwulan I sebesar Rp. 0,00.

2.3.2 Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin

Sub kegiatan ini berisi Belanja Bimtek Andalalin dan perjalanan dinas bimtek.

Jumlah pagu anggaran Rp. 27.237.000,00 realisasi keuangan s/d Triwulan I sebesar Rp. 0,00.

2.3.3 Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin.

Sub kegiatan ini berisi Belanja makanan dan minuman rapat, honor Tim Pengawas Andalalin, dan perjalanan dinas.

Jumlah pagu anggaran Rp. 7.040.000,00 realisasi keuangan s/d Triwulan I sebesar Rp. 640.000,00 dengan progres 9,09%.

2.4 Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

2.4.1 Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini berisi belanja bahan-bahan bakar dan pelumas, belanja pemeliharaan operasional bus, dan perjalanan dinas.

Jumlah pagu anggaran Rp. 896.687.590,00 realisasi keuangan s/d Triwulan I sebesar Rp. 111.291.500,00 dengan progress 12,41%.

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor

2.5 Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

2.5.1 Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Sub kegiatan ini berisi Pengadaan gedung uji kendaraan bermotor

Jumlah pagu anggaran Rp. 4.927.514.488,00 realisasi keuangan s/d Triwulan I sebesar Rp 0.

2.5.2 Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala

Sub kegiatan ini berisi Pengadaan kartu uji berkala kendaraan bermotor

Jumlah pagu anggaran Rp. 45.000.000,00 realisasi keuangan s/d Triwulan I sebesar Rp 0,00.

2.5.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Sub kegiatan ini berisi belanja kalibrasi alat uji, dan Pemeliharaan alat uji.

Jumlah pagu anggaran Rp. 155.000.000,00 realisasi keuangan s/d Triwulan I sebesar Rp. 0.

2.6 Kegiatan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

2.6.1 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Belanja ATK, belanja kertas dan cover, belanja perlengkapan bahan computer.

Jumlah pagu anggaran Rp. 11.894.328,23 realisasi keuangan s/d Triwulan I sebesar Rp. 1.677.850,00 dengan progress 14,11%.

2.6.2 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Belanja Blanko Uji.

Jumlah pagu anggaran Rp. 7.988.864,25 realisasi keuangan s/d Triwulan I sebesar Rp. 0.

UPTD Terminal dan Perparkiran

2.7 Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

2.7.1 Sub Kegiatan Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang.

Belanja konsultan dan pembangunan.

Jumlah pagu anggaran Rp. 489.567.557,38 realisasi keuangan s/d Triwulan I sebesar Rp. 0.

2.8 Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

2.8.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota.

Belanja Imbal jasa pemungut retribusi parkir

Jumlah pagu anggaran Rp. 208.038.447,00 realisasi keuangan s/d Triwulan I sebesar Rp. 0.

2.9 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

2.9.1 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Belanja ATK, belanja kertas dan cover, belanja perlengkapan bahan computer, Pembelian laptop.

Jumlah pagu anggaran Rp. 11.828.085,63 realisasi keuangan s/d Triwulan I sebesar Rp. 9.592.000,00 dengan progress 81,10%.

2.9.2 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Belanja cetak karcis.

Jumlah pagu anggaran Rp. 62.268.000,00 realisasi keuangan s/d Triwulan I sebesar Rp. 0.

UPTD Pelabuhan dan Penyeberangan

3. Program Pengelolaan Pelayaran

3.1 Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota

3.1.1 Sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Sub kegiatan belanja bahan-bahan bakar dan pelumas, dan perjalanan dinas.

Jumlah pagu anggaran Rp. 29.887.000,00 realisasi keuangan s/d Triwulan I sebesar Rp. 2.407.500,00 dengan progress 8,06%.

3.2 Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau

3.2.1 Sub kegiatan Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau.

Sub kegiatan berisi Pembangunan dermaga di pantai Batakan Baru.

Jumlah pagu anggaran Rp. 1.123.737.809,00 realisasi keuangan s/d Triwulan I sebesar Rp. 0.

3.3 Kegiatan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

3.3.1 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Belanja kertas dan cover, dan pembelian laptop.

Jumlah pagu anggaran Rp. 12.669.763,1 realisasi keuangan s/d Triwulan I sebesar Rp. 0.

3.3.2 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Belanja fotocopy dan penjiilidan.

Jumlah pagu anggaran Rp. 3.969.734,17 realisasi keuangan s/d Triwulan I sebesar Rp. 0.

Jumlah realisasi keuangan seluruhnya terserap sebesar 12,05% sampai dengan bulan Maret 2025 (Triwulan I). Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Triwulan I seperti tampak pada tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Triwulan I Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut

No.	Program/Kegiatan/ dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Output Kinerja	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	
					I		II		III		IV					
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		10=9/4x100%	
A	Dinas Perhubungan (Bidang-Bidang dan Sekretariat)			35.044.004.406,19		5.014.278.325,00							-	5.014.278.325,00		14,31%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM sekretariat Dishub	83	9.015.034.704,62		2.025.561.420,00							-	2.025.561.420,00	0,00%	22,47%
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	3.467.581,80	26,67	-							26,67	-	26,67%	0,00%
	▪ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	1.703.061,90	2								2,00	-	28,57%	0,00%
	▪ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6	1.764.519,90	2								2,00	-	33,33%	0,00%
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100	6.046.285.849,80	100	1.431.992.548,00							100,00	1.431.992.548,00	100,00%	23,68%
	▪ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ bulan)	39	6.045.103.666,00	40	1.431.992.548,00							40,00	1.431.992.548,00	102,56%	23,69%
	▪ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	5	1.182.183,80	4	-							4,00	-	80,00%	0,00%
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	211.405.313,02	21,78	101.063.949,00							21,78	101.063.949,00	21,78%	47,81%
	▪ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	8.002.557,00	1	7.018.000,00							1,00	7.018.000,00	100,00%	87,70%
	▪ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7	79.351.276,02	5	48.279.975,00							5,00	48.279.975,00	71,43%	60,84%
	▪ Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	7.956.480,00	1	2.200.000,00							1,00	2.200.000,00	100,00%	27,65%

No.	Program/Kegiatan/ dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Output Kinerja	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	
					I		II		III		IV					
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		10=9/4x100%	
	▪ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	2.400.000,00	1	480.000,00							1,00	480.000,00	100,00%	20,00%
	▪ Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2	15.000.000,00	0	-							-	-	0,00%	0,00%
	▪ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	190	98.695.000,00	36	43.085.974,00							36,00	43.085.974,00	18,95%	43,66%
1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	2.443.875.960,00	25,00	447.923.823,00							25,00	447.923.823,00	25,00%	18,33%
	▪ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	151.500.000,00	3	31.672.839,00							3,00	31.672.839,00	25,00%	20,91%
	▪ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	2.292.375.960,00	3	416.250.984,00							3,00	416.250.984,00	25,00%	18,16%
1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	310.000.000,00	38,60	44.581.100,00							38,60	44.581.100,00	38,60%	14,38%
	▪ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	31.000.000,00	1	3.393.000,00							1,00	3.393.000,00	100,00%	10,95%
	▪ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	9	259.000.000,00	9	35.188.100,00							9,00	35.188.100,00	100,00%	13,59%
	▪ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	47	20.000.000,00	12	6.000.000,00							12,00	6.000.000,00	25,53%	30,00%

No.	Program/Kegiatan/ dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Output Kinerja	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	
					I		II		III		IV					
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		10=9/4x100%	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1. Indeks Kelancaran Lalulintas	0,35	26.028.969.701,57		2.988.716.905,00							-	2.988.716.905,00	0,00%	11,48%
		2. Persentase prasaranaan perhubungan (%)	66,70													
2.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten Tanah Laut (%)	63,60	24.662.397.221,49		2.806.226.605,00							-	2.806.226.605,00	0,00%	11,38%
	▪ Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	327	24.551.709.221,49		2.805.206.605,00							-	2.805.206.605,00	0,00%	11,43%
	▪ Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	3	110.688.000,00		1.020.000,00							-	1.020.000,00	0,00%	0,92%
2.2	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase ruas jalan kabupaten yang dilakukan manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (%)	46,85	426.076.332,08		70.558.800,00							-	70.558.800,00	0,00%	16,56%
	▪ Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	12	365.311.130,00		53.060.000,00							-	53.060.000,00	0,00%	14,52%
	▪ Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	6	7.200.000,00		-							-	-	0,00%	0,00%
	▪ Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi (Laporan)	12	53.565.202,08		17.498.800,00							-	17.498.800,00	0,00%	32,67%
2.3	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase dokumen andalalin yang diterbitkan	100	43.808.558,00		640.000,00							-	640.000,00	0,00%	1,46%
	▪ Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin (Laporan)	15	9.531.558,00		-							-	-	0,00%	0,00%
	▪ Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi (Orang)	2	27.237.000,00		-							-	-	0,00%	0,00%

No.	Program/Kegiatan/ dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Output Kinerja	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	
					I		II		III		IV					
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		10=9/4x100%	
	▪ Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi (Laporan)	8	7.040.000,00		640.000,00							-	640.000,00	0,00%	9,09%
2.4	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah angkutan umum untuk angkutan orang yang tersedia (unit)	8	896.687.590,00	8	111.291.500,00							8,00	111.291.500,00	100,00%	12,41%
	▪ Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	8	896.687.590,00	8	111.291.500,00							8,00	111.291.500,00	100,00%	12,41%
B	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor			5.147.397.680,48		1.677.850,00							-	1.677.850,00		0,03%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM sekretariat Dishub	83	19.883.192,48		1.677.850,00							-	1.677.850,00	0,00%	8,44%
1.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	19.883.192,48		1.677.850,00							-	1.677.850,00	0,00%	8,44%
	▪ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	11.894.328,23	1	1.677.850,00							1,00	1.677.850,00	100,00%	14,11%
	▪ Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	7.988.864,25		-							-	-	0,00%	0,00%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1. Indeks Kelancaran Lalulintas	0,35	5.127.514.488,00		-							-	-	0,00%	0,00%
		2. Persentase prasaranan perhubungan	66,70										-	-	0,00%	#DIV/0!
2.1	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang terlayani	75%	5.127.514.488,00		-							-	-	0,00%	0,00%
	▪ Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	1	4.927.514.488,00		-							-	-	0,00%	0,00%

No.	Program/Kegiatan/ dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Output Kinerja	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	
					I		II		III		IV					
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		10=9/4x100%	
	▪ Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)	1800	45.000.000,00		-							-	-	0,00%	0,00%
	▪ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)	12	155.000.000,00		-							-	-	0,00%	0,00%
C	UPTD Terminal dan Perparkiran			771.702.090,01		56.703.500,00							-	56.703.500,00		7,35%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM sekretariat Dishub	83	74.096.085,63		9.592.000,00							-	9.592.000,00	0,00%	12,95%
1.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	74.096.085,63	50	9.592.000,00							50,00	9.592.000,00	50,00%	12,95%
	▪ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	11.828.085,63	1	9.592.000,00							1,00	9.592.000,00	100,00%	81,10%
	▪ Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	62.268.000,00		-							-	-	0,00%	0,00%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1. Indeks Kelancaran Lalulintas	0,35	697.606.004,38		47.111.500,00							-	47.111.500,00	0,00%	6,75%
		2. Persentase prasaranan perhubungan	66,70													
2.1	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase sarana dan prasarana terminal tipe C yang memenuhi standar	75	489.567.557,38		-							-	-	0,00%	0,00%
	▪ Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang (Unit)	2	489.567.557,38		-							-	-	0,00%	0,00%
2.2	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir (%)	66,6	208.038.447,00		47.111.500,00							-	47.111.500,00	0,00%	22,65%

No.	Program/Kegiatan/ dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Output Kinerja	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	
					I		II		III		IV					
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		10=9/4x100%	
	▪ Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	12	208.038.447,00	3	47.111.500,00							3,00	47.111.500,00	25,00%	22,65%
D	UPTD Pelabuhan dan Penyeberangan			1.170.264.306,27		2.407.500,00							-	2.407.500,00		0,21%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM sekretariat Dishub	83	16.639.497,27		-							-	-	0,00%	0,00%
1.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	16.639.497,27		-							-	-	0,00%	0,00%
	▪ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	12.669.763,10		-							-	-	0,00%	0,00%
	▪ Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	3.969.734,17		-							-	-	0,00%	0,00%
2	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Lintas Penyeberangan dan Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten (%)	100	1.153.624.809,00		2.407.500,00							-	2.407.500,00	0,00%	0,21%
2.1	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota (%)	100	29.887.000,00		2.407.500,00							-	2.407.500,00	0,00%	8,06%
	▪ Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	1	29.887.000,00		2.407.500,00							-	2.407.500,00	0,00%	8,06%

No.	Program/Kegiatan/ dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Output Kinerja	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	
					I		II		III		IV					
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		10=9/4x100%	
2.2	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	100	1.123.737.809,00	-								-	-	0,00%	0,00%
	▪ Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan (Unit)	1	1.123.737.809,00									-	-	0,00%	0,00%
				42.133.368.482,95		5.075.067.175,00							-	5.075.067.175,00		12,05%

**Tabel 2.2 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 Kabupaten Tanah Laut**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9)	(10=7+9)	(11=10/4)
	Dinas Perhubungan (Bidang-Bidang dan Sekretariat)									
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM sekretariat Dishub	85	81,48	82	83,15	101,40	83	83,15	97,82
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	100	100	100	100,00	100	100	100
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	21	7	7	7	100	7	14	66,67
2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	18	6	6	6	100	6	12	66,67

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9)	(10=7+9)	(11=10/4)
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ bulan)	108	36	39	39	100	45	84	77,78
2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	15	5	5	5	100	5	10	66,67
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	18	1	12	12	100	1	13	72,22
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	33	8	8	8	100	7	15	45,45

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9)	(10=7+9)	(11=10/4)
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	1	4	4	100	1	5	41,67
2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3	1	1	1	100	1	2	66,67
2.15.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	6	2	2	2	100	2	4	66,67
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	570	190	190	110	58	190	300	52,63
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36	12	12	12	100	12	24	66,67

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9)	(10=7+9)	(11=10/4)
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	36	12	12	12	100	12	24	66,67
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100	0	100	100,00
2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3	0	4	4	0	0	4	133,33
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100,00
2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	1	1	100	1	1	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9)	(10=7+9)	(11=10/4)
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	27	9	9	9	100	9	18	66,67
2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	150	50	50	24	48	47	71	47,33
2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	0	1	1	0	0	1	50,00
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1. Indeks Kelancaran Lalulintas	0,4	0,26	0,25	0,57	43,86	0,35	0,57	70,18
		2. Persentase prasaranan perhubungan (%)	100	2	33,4	33,4	100	66,7	67,72	67,72
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Prosentase Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Tanah Laut	100	0	100	100	0	0	100	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9)	(10=7+9)	(11=10/4)
2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	3	0	3	3	0	0	3	100,00
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten Tanah Laut (%)	100	2,6	31,8	53,65	169	63,6	67,72	67,72
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	4830	33	2722	2722	100	719	3441	71,24
2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	300	1	30	30	100	3	33	11,00
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase ruas jalan kabupaten yang dilakukan manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (%)	74,22	19,47	22,11	22,11	100	46,85	68,96	92,91

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9)	(10=7+9)	(11=10/4)
2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	36	12	12	12	100	12	24	66,67
2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	18	4	4	4	100	6	10	55,56
2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi (Laporan)	25	1	1	1	100	12	13	52,00
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase dokumen andalalin yang diterbitkan	100	100	100	100	100	100	100	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9)	(10=7+9)	(11=10/4)
2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin (Laporan)	45	12	15	15	100	15	30	66,67
2.15.02.2.07.0005	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi (Orang)	6	0	2	1	0	2	3	50,00
2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi (Laporan)	26	5	6	6	100	8	14	53,85
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah angkutan umum untuk angkutan orang yang tersedia (unit)	6	4	6	6	100	8	14	233,33

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9)	(10=7+9)	(11=10/4)
2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	6	4	6	6	100	8	14	233,33
	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor									
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM sekretariat Dishub	85	81,48	82	83,15	101,40	83	83,15	97,82
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	0	100	100	100	100	100	100,00
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	0	1	1	100	1	2	66,67
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	0	1	1	100	1	2	66,67

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9)	(10=7+9)	(11=10/4)
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1. Indeks Kelancaran Lalulintas	0,4	0,26	0,25	0,57	43,86	0,35	0,57	70,18
		2. Persentase prasaranan perhubungan (%)	100	2	33,4	33,4	100	66,7	67,72	67,72
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang terlayani	100	49	50	50	100	75	75	75,00
2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	1	1	1	1	100	1	1	100,00
2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)	5400	0	1800	1800	100	1800	3600	66,67
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)	12	12	12	11	92	12	23	191,67

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9)	(10=7+9)	(11=10/4)
	UPTD Terminal dan Perparkiran								0	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM sekretariat Dishub	85	81,48	82	83,15	101,40	83	83,15	97,82
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	0	100	100	0	100	100	100,00
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	0	1	1	0	1	2	66,67
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	0	1	1	0	1	2	66,67

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9)	(10=7+9)	(11=10/4)
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1. Indeks Kelancaran Lalulintas	0,4	0,26	0,25	0,57	43,86	0,35	0,57	70,18
		2. Persentase prasaranan perhubungan (%)	100	2	33,4	33,4	100	66,7	67,72	67,72
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase sarana dan prasarana terminal tipe C yang memenuhi standar	100	0	36,36	36,36	100	75	75	75,00
2.15.02.2.03.0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang (Unit)	8	0	4	4	0	2	6	75,00
2.15.02.2.03.0011	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	3	1	1	1	100	0	1	33,33

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9)	(10=7+9)	(11=10/4)
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir (%)	100	24	33,33	33,33	100	33,33	66,66	66,66
2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	36	12	12	0	0	12	12	33,33

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9)	(10=7+9)	(11=10/4)
	UPTD Pelabuhan dan Penyeberangan									
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM sekretariat Dishub	85	81,48	82	83,15	101,40	83	83,15	97,82
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	0	100	100	100,00	100	100	100,00
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	0	1	1	100,00	1	2	66,67
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	0	1	1	100,00	1	2	66,67

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9)	(10=7+9)	(11=10/4)
2.15.02	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Lintas Penyeberangan dan Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten (%)	100	100	100	100	100,00	100	200	200,00
2.15.03.2.07	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota (%)	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
2.15.03.2.07.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	3	1	1	1	100,00	1	2	66,67

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9)	(10=7+9)	(11=10/4)
2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	100	0	100	0	0,00	100	0	0,00
2.15.03.2.13.0006	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan (Unit)	1	0	1	0	0,00	1	0	0,00

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menganalisis kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Permendagri nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Adapun analisis kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut sesuai aturan tersebut diatas dapat disampaikan melalui Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan
Kabupaten Tanah Laut

No.	Uraian Indikator	Satuan	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target			Realisasi Capaian			Catatan Analisis
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1.	Rasio Konektivitas kabupaten/kota	Rasio		√	0,71	0,71	0,79	0,71	0,8	0,8	

1. Perhitungan Rasio Konektivitas kabupaten/Kota :

Rasio konektivitas Kabupaten/Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) +

(IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan).

a. Perhitungan IK1 (Angkutan Jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pada provinsi x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada provinsi tersebut)

Hasil Perhitungan IK1 = $(6 \times 1) / 8 = 0,75$

b. Perhitungan IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = (Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada provinsi tersebut x bobot lintas) dibagi (Jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada provinsi tersebut)

Hasil Perhitungan IK2 = $(3 \times 0,6) / 3 = 0,6$

Hasil perhitungan rasio konektivitas Kabupaten Tanah Laut ,

yaitu: $(IK1 \ 0,75 \times 0.7) + (IK2 \ 0,6 \times 0.3) = 0,525 + 0,18 = \mathbf{0,71}$

Rekapitulasi Data Pelayanan Kebutuhan Trayek

No	Layanan	Total Trayek	Rata-rata Bobot Trayek
1.	Jumlah Trayek Terlayani		
	a. Antar Kota Dalam Kabupaten/Kota	7	1
	b. Antar Kota Antar Kabupaten/Kota	1	1
2.	Jumlah Kebutuhan Trayek		
	a. Antar Kota Dalam Kabupaten/Kota	5	1
	b. Antar Kota Antar Kabupaten/Kota	1	1
	Jumlah	14	4

Rekapitulasi Data Pelayanan Kebutuhan Lintas

No.	Layanan	Total Lintas	Rata-rata Bobot Lintas
1.	Jumlah Lintas Terlayani	3	0,6
2.	Jumlah Kebutuhan Lintas	3	1
	Jumlah	6	1,6

Rincian Data Kebutuhan Trayek

No	Kode	Rute	Layanan	Frekuensi Seminggu
1	A.01	Pelaihari - Kurau	Angkutan Pedesaan	14
2	A.02	Pelaihari – Takisung	Angkutan Pedesaan	14
3	A.03	Pelaihari – Batakan	Angkutan Pedesaan	7
4	A.04	Pelaihari – Kintap	Angkutan Pedesaan	14
5	A.05	Pelaihari – Bajuin	Angkutan Pedesaan	28
6	P.01	Angkutan kota pelaihari trayek 1	Angkutan Perkotaan	46
7	P.02	Angkutan kota pelaihari trayek 2	Angkutan Perkotaan	43
8	-	Pelaihari – Bati Bati	Angkutan metropolitan Banjarbakula	196

Rincian Data Trayek yang Dilayani

No	Rute	Layanan	Frekuensi Seminggu	Keterangan	Bobot
1	Pelaihari - Tabanio (Kec. Takisung)	Angkutan Perintis DAMRI	7	Tinggi	1
2	Pelaihari - Batakan (Kec. Panyipatan)	Angkutan Perintis DAMRI	7	Tinggi	1
3	Pelaihari - Jorong (Kec. Jorong)	Angkutan Perintis DAMRI	7	Tinggi	1
4	Terminal HSPA – Pasar Eks Bajuin Plaza	LAKATAN	28	Tinggi	1
5	Terminal HSPA – RSUD H. Boejasin	LAKATAN	28	Tinggi	1
6	Pelaihari – Terminal Gambut Barakat	BTS Banjarbakula	196	Tinggi	1
Rata-rata Bobot					1

Rincian Data Kebutuhan Lintas

No	Lintasan	Jalur	Frekuensi Seminggu	Keterangan
1	Batakan – Pulau Datu	Batakan baru – pulau datu	105	Angkutan wisata religi
2	Pulau kalimantan – Pulau Keramaian	Kecamatan jorong – pulau keramaian	1	Pelayaran lintas kabupaten
3	Pulau kalimantan – Pulau Masalembo	Kecamatan jorong – pula masalembo	1	Pelayaran lintas kabupaten

Rincian Data Lintas yang Dilayani

No	Lintasan	Jalur	Frekuensi	Keterangan	Bobot
1	Batakan – Pulau Datu	Batakan baru – pulau datu	56 Seminggu	Tinggi	1
2	Pulau kalimantan – Pulau Keramaian	Kecamatan jorong – pulau keramaian	1	Rendah	0,5
3	Pulau kalimantan – Pulau Masalembo	Kecamatan jorong – pula masalembo	1	Rendah	0,5
Rata2 Bobot					0,6

Frekuensi	Keterangan	Bobot
>5x seminggu	Tinggi	1
3-4x seminggu	Sedang	0,8
<3x seminggu	Rendah	0,5

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Beberapa isu strategis pembangunan dan pengembangan sektor perhubungan yang terangkat berdasarkan kondisi faktual di lapangan, inventarisasi permasalahan - permasalahan kunci, evaluasi capaian kinerja dalam jangka waktu 5 tahun terakhir dan memperhatikan RPD Kabupaten Tanah Laut 2024 - 2026, maka isu strategis pembangunan dan pengembangan sektor perhubungan untuk 3 tahun kedepan adalah :

1. Terbatasnya ketersediaan dan pelayanan angkutan umum menyebabkan masih tingginya penggunaan kendaraan pribadi;
2. Belum optimalnya tingkat pelayanan angkutan umum sebagai penghubung pusat kegiatan strategis
3. Sistem dan jaringan transportasi intermoda/multimoda belum terintegrasi dengan baik, menyebabkan tidak efesiennya dan efektifnya mobilitas penduduk;
4. Sarana dan prasarana transportasi yang belum sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan transportasi;

5. Belum optimalnya penyelenggaraan terminal angkutan penumpang tipe C;
6. Belum optimalnya pelayanan dermaga penyeberangan
7. Belum adanya transportasi berbasis rel,
8. Kurangnya SDM berlatar belakang teknis perhubungan.

Pada pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD agar selalu dapat terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan maka terdapat beberapa isu penting yang harus diperhatikan yang dapat terbagi menjadi isu teknis dan isu non teknis.

Isu Teknis yang harus diperhatikan antara lain :

- Sarana dan Prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dapat menunjang penyelesaian pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien sesuai tugas dan fungsi SKPD

- Waktu dan jadwal

Yaitu waktu pelaksanaan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD. Dengan memperhatikan waktu tersebut, maka dapat direncanakan jadwal untuk pelaksanaan pekerjaan agar tercapai dengan sesuai target.

- Regulasi Hukum

Regulasi hukum yang merupakan dasar dari pelaksanaan semua tugas dan fungsi SKPD merupakan salah satu hal yang penting sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD tidak berjalan secara asal dan sembarangan.

Masalah Non Teknis yang dihadapi antara lain adalah :

- Faktor Alam

Faktor alam yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan yang disebabkan antara lain karena musim hujan dan lain-lain. Musim hujan yang tidak dapat ditebak menyebabkan jadwal pelaksanaan kegiatan terganggu.

- Faktor Sosial Masyarakat

Terdapat faktor sosial yakni Keadaan masyarakat yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD. Kondisi yang sedang terjadi di masyarakat harus diperhatikan dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut akan menampung usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi maupun dari instansi terkait yang langsung ditujukan kepada SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

Pada APBD Perubahan tahun ini Dinas Perhubungan mengakomodir usulan-usulan program dan kegiatan Masyarakat berupa perlengkapan jalan seperti : rambu-rambu dan penerangan jalan umum.

Tabel 2.4 :
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025 (Perubahan Anggaran 2025)

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota					
	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia :	321 Titik	
1		Rt 2 Desa Kunyit Kec. Bajuin	▪ Lampu Sorot	1 Titik	
2		Rt 2 Desa Kunyit Kec. Bajuin	▪ Lampu Jalan	15 Titik	
3		Rt 1,3,4,5,dan 6 Desa Kunyit Kec. Bajuin	▪ Penambahan Rambu-Rambu Jalan	20 unit	
4		Jl. Bukit Sabat Matah RT. 7	▪ PJU	10 Titik	
5		Desa Karang Rejo RT 12	▪ PJU	66 Titik	
6		Depan Kantor Desa Muara Asam Asam	▪ Lampu Sorot	1 Titik	
7		Depan SMP 4 Muara Asam-Asam	▪ Lampu Sorot	1 Titik	
8		Desa Asri Mulya	▪ PJU	37 Titik	
9		Desa Muara Asam-Asam	▪ PJU	20 Titik	
10		Desa Benua Tengah RT 11	▪ PJU	1 Titik	
11		Desa Takisung RT 09 dan RT 12	▪ PJU	12 Titik	
12		RT 27 RW 28 Kel. Pelaihari	▪ Penerangan Jalan Umum dan Tiang Listrik	1 Titik	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
13		Desa Gunung Makmur RT 20 Kec. Takisung	▪ Pemasangan PJU Tiang dan Lampu	5 Titik	
14		Desa Gunung Makmur RT 20 Kec. Takisung	▪ Pemasangan PJU	10 Titik	
15		Desa Gunung Makmur RT 10 Kec. Takisung	▪ Pemasangan PJU Tiang dan Lampu	5 Titik	
16		Desa Panung RT 13A	▪ Lampu PJU	1 Titik	
17		Desa Kandungan Lama RT 6 - RT 8	▪ Lampu PJU	1 Titik	
18		Desa Batu Tungku RT 6 - RT 8	▪ Lampu PJU	1 Titik	
19		Jl.A. Yani Simpang3Blok FRT 01 RW 01 Desa Sungai Cuka Kec. Kintap	▪ Lampu Sorot Lengkap	1 Titik	
20		Desa Sungai Cuka Kec. Kintap	▪ Lampu Sorot Lengkap	1 Titik	
21		Desa Sungai Cuka Kec. Kintap Dusun 01	▪ PJU	20 Titik	
22		Desa Kuala Tambangan Kec. Takisung	▪ Penerangan Jalan Umum	1 Titik	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Rencana strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut juga harus merujuk pada Renstra kementerian perhubungan untuk dapat membantu dan mendukung berjalannya seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Pembangunan perhubungan nasional sangat berpengaruh besar terhadap perekonomian nasional, mengingat kegiatan dibidang transportasi berperan penting dalam kegiatan distribusi barang dan jasa keseluruh pelosok tanah air dan antar negara. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan perhubungan berdampak signifikan terhadap kondisi perekonomian nasional. Untuk itu, pembangunan infrastruktur masih merupakan prioritas nasional dari presiden sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam mengembangkan transportasi dalam kurun waktu 2025-2029 adalah mengupayakan tersedianya infrastruktur melalui pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi yang berkelanjutan, guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau serta membuka keterisolasian wilayah tertinggal, pedalaman maupun perbatasan. Keterkaitan ini dapat dijelaskan secara rinci bahwa usaha jasa perhubungan sebagai bagian integral dari kegiatan perekonomian bangsa, mengemban fungsi aksesibilitas keseluruh wilayah tanah air sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Adapun visi Presiden dan Wakil Presiden RI adalah :

“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.”

Visi tersebut mengandung arti bahwa Pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

Untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);

2. Memantapkan system pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. **Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas**, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat Pembangunan sumberdaya manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran Perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai Masyarakat yang adil dan Makmur.

Pencapaian visi dan misi tersebut didukung oleh 17 program prioritas, 8 program hasil terbaik cepat (*Quick Wins*), dan 320 program kerja.

Dalam mendukung visi dan misi Presiden RI, Kementerian Perhubungan secara umum melaksanakan agenda pembangunan nasional **Prioritas Nasional 3** yaitu **“Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas.”**

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Agenda Pembangunan Tahun 2025-2029 tersebut Kementerian Perhubungan melaksanakan Sasaran Strategis, sebagai berikut :

1. Terwujudnya pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan;
2. Menguatnya kinerja layanan konektivitas backbone dan system logistic nasional untuk mendukung integrasi ekonomi domestic dan global

Dari telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut, pada Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2026 ini bertema:

TERWUJUDNYA TRANSPORTASI TANAH LAUT YANG MANDIRI

(Modern, Adaptive, sustainNable, eDucative, Innovative, Responsible and Integrated)

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Adapun tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan RENSTRA 2024 - 2026 adalah sebagai berikut :

3.2.1. Tujuan :

- Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas;
- Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja internal Pemerintah Daerah.

3.2.2. Sasaran :

- Meningkatkan pembangunan infrastruktur perhubungan yang berkualitas
- Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja internal Dinas Perhubungan

Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran Dishub Kabupaten Tanah Laut selama 3 (tiga) tahun ke depan seperti tampak pada tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran PD		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-		
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas		Indeks infrastruktur	43,64	47,11	47,91	54,21	60,49
		Meningkatkan pembangunan infrastruktur perhubungan yang berkualitas	Indeks infrastruktur perhubungan	64,25	65,55	26,9	33,49	40,11
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja internal Pemerintah Daerah		Nilai SAKIP Kabupaten	67,28	67,52	70,01	75,00	80,01
		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja internal Dinas Perhubungan	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	72,80	71,80	75,00	78,00	80,01

3.3. Program dan Kegiatan

a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

- Pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026, dalam peningkatan ekonomi masyarakat secara merata dengan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan;
- Meningkatkan pembangunan infrastruktur perhubungan yang berkualitas;
- Terwujudnya konektivitas kabupaten/kota;
- Membangun sistem angkutan umum masal berbasis jalan dengan menyiapkan Bus Angkutan Feeder dari Halte BRT Bati-bati ke Pelabuhan;
- Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja internal Dinas Perhubungan.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

Untuk mencapai sasaran RPD tahun 2024-2026 yang sekaligus menjadi tujuan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut menggunakan 3 program 18 kegiatan, dan 38 sub kegiatan dengan jumlah anggaran **Rp. 42.894.089.980,95** bertambah **Rp. 1.931.546.164,84** menjadi **Rp. 44.825.636.145,79**.

c. Tabel rencana program dan kegiatan, yaitu sebagai berikut :

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan yang digunakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut untuk tahun 2025 adalah seperti tampak pada tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3.2 :
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Dinas Perhubungan (Bidang-Bidang dan Sekretariat)				42.558.591.620,19				38.537.866.527,85
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM sekretariat Dishub		83	9.905.218.665,11			85	9.880.336.441,37
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	3.467.581,80			100%	4.995.000,00
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SKPD	7 Dokumen	1.703.061,90	PAD		7 Dokumen	2.497.500,00
2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SKPD	6 Laporan	1.764.519,90	PAD		6 Laporan	2.497.500,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	6.807.007.347,80			100%	7.244.372.691,78
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	SKPD	45 Orang/bulan	6.805.825.164,00	PAD SILPA DAU		45 Orang/bulan	7.242.875.526,00
2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	SKPD	5 Dokumen	1.182.183,80	PAD		5 Dokumen	1.497.165,78
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	340.867.775,51			100%	525.410.827,15
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	SKPD	1 Paket	8.002.557,00	PAD		6 Paket	8.003.518,47
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	SKPD	7 Paket	105.866.272,26	PAD		8 Paket	88.007.318,68

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	SKPD	1 Paket	7.956.480,00	PAD		1 Paket	9.999.990,00
2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	SKPD	1 Dokumen	2.400.000,00	PAD		1 Dokumen	2.400.000,00
2.15.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	SKPD	2 Paket	17.947.466,25	PAD		2 Paket	17.000.000,00
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SKPD	190 Laporan	198.695.000,00	PAD		250 Laporan	400.000.000,00
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	100%	754.800.000,00
2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	SKPD	-	-	-	-	1 Unit	754.800.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	2.443.875.960,00			100%	676.935.600,00
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	SKPD	12 Laporan	151.500.000,00	PAD		12 Laporan	148.935.600,00
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	SKPD	12 Laporan	2.292.375.960,00	PAD		12 Laporan	528.000.000,00
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	SKPD	100%	310.000.000,00			100%	673.822.322,44
2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	SKPD	1 Unit	31.000.000,00	PAD		1 Unit	34.380.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	SKPD	9 Unit	259.000.000,00	PAD		34 Unit	369.420.000,00
2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	SKPD	47 Unit	20.000.000,00	PAD		50 Unit	21.700.000,00
2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	SKPD		-			1 Unit	248.322.322,44
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1. Indeks Kelancaran Lalulintas		0,35	32.653.372.955,08			0,35	28.657.530.086,48
		2. Persentase prasaranan perhubungan		66,70%				100%	
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Prosentase Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Tanah Laut		100%	-	-	-	100%	297.321.427,62
2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	SKPD	-	-	-	-	1 Dokumen	297.321.427,62

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten Tanah Laut		63,60%	31.167.271.541,66			100%	26.417.422.317,98
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab. Tanah Laut	719 Unit	31.056.583.541,66	PAD PBJT		1396 Unit	11.287.596.867,98
2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Kec. Pelaihari	3 Unit	110.688.000,00	PAD		12054 Unit	15.129.825.450,00
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase ruas jalan kabupaten yang dilakukan manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		46,85%	566.121.107,42			27,37%	709.736.090,88
2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	SKPD	12 Laporan	365.240.905,00	PAD		15 laporan	379.717.455,00
2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	SKPD	6 Laporan	14.160.000,00	PAD		8 laporan	28.800.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	SKPD	12 Laporan	186.720.202,42	PAD		2 laporan	301.218.635,88
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase dokumen andalalin yang diterbitkan		100%	54.308.558,00			100%	87.525.400,00
2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	SKPD	15 Laporan	15.831.558,00	PAD		1 laporan	20.648.200,00
2.15.02.2.07.0005	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	SKPD	2 Orang	27.237.000,00	PAD		2 laporan	39.940.000,00
2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	SKPD	8 Laporan	11.240.000,00	PAD		2 laporan	26.937.200,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah angkutan umum untuk angkutan orang yang tersedia		8 unit	865.671.748,00			8 unit	1.145.524.850,00
2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	SKPD	8 Unit	865.671.748,00	PAD		8 Unit	1.145.524.850,00
	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor				243.132.753,88				359.851.579,40
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM sekretariat Dishub		83	19.883.192,48			85	24.974.129,40
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	19.883.192,48			100%	24.974.129,40
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	UPT PKB	1 Paket	11.894.328,23	PAD		1 Paket	14.989.679,40
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan	UPT PKB	1 Paket	7.988.864,25	PAD		1 Paket	9.984.450,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Penggandaan yang Disediakan							
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1. Indeks Kelancaran Lalulintas		0,35	223.249.561,40			0,35	334.877.450,00
		2. Persentase prasaranan perhubungan		66,70%				100%	
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang terlayani		75%	223.249.561,40			100%	334.877.450,00
2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	UPT PKB	1 Unit	23.249.561,40	PAD OPSEN PKB		-	-
2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	UPT PKB	1800 Dokumen	45.000.000,00	PAD		2000 Dokumen	135.377.450,00
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	UPT PKB	12 Unit	155.000.000,00	PAD OPSEN PKB		12 Unit	199.500.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	UPTD Terminal dan Perparkiran				1.568.291.579,73				966.433.397,30
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM sekretariat Dishub		83	85.298.306,64			85	144.985.792,46
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	85.298.306,64			100%	144.985.792,46
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	UPT Terminal dan Perparkiran	1 Paket	15.304.706,64	PAD		1 Paket	64.999.192,46
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	UPT Terminal dan Perparkiran	1 Paket	69.993.600,00	PAD		1 Paket	79.986.600,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1. Indeks Kelancaran Lalulintas		0,35	1.482.993.273,09			0,35	821.447.604,84
		2. Persentase prasaranan perhubungan		66,70%				100%	
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase sarana dan prasarana terminal tipe C yang memenuhi standar		75%	774.954.826,09			100%	272.282.604,84
2.15.02.2.03.0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	UPT Terminal dan Perparkiran	2 Unit	774.954.826,09	PAD OPSEN PKB		2 Unit	199.946.056,02
2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah fasilitas utama /pendukung terminal yang di rehab / di bangun	UPT Terminal dan Perparkiran			PAD OPSEN PKB		1 Unit	72.336.548,82

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		66,60%	708.038.447,00			66,60%	549.165.000,00
2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	UPT Terminal dan Perparkiran	12 Laporan	708.038.447,00			12 Laporan	549.165.000,00
	UPTD Pelabuhan dan Penyeberangan				455.620.191,99				6.065.581.227,71
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM sekretariat Dishub		83	16.639.497,27			85	20.686.637,81
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	16.639.497,27			100%	20.686.637,81

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	UPTD Pelabuhan dan Penyeberangan	1 Paket	12.669.763,10	PAD		1 Paket	14.999.401,85
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	UPTD Pelabuhan dan Penyeberangan	1 Paket	3.969.734,17	PAD		1 Paket	5.687.235,96
2.15.02	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Lintas Penyeberangan dan Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten		100%	438.980.694,72			100%	6.044.894.589,90
2.15.03.2.07	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota		100%	29.887.000,00			100%	49.885.500,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.15.03.2.07.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	UPTD Pelabuhan dan Penyeberangan	1 Laporan	29.887.000,00	PAD		1 Laporan	49.885.500,00
2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau		100%	409.093.694,72			100%	5.995.009.089,90
2.15.03.2.13.0006	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan	UPTD Pelabuhan dan Penyeberangan	1 Unit	409.093.694,72	PAD OPSEN PKB		1 Unit	5.995.009.089,90
Total Anggaran					44.825.636.145,79				45.929.732.732,26

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
	Dinas Perhubungan							35.788.549.367,00	36.223.916.010,15	41.189.675.403,29	5.401.126.036,29						32.923.639.586,00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							35.788.549.367,00	36.223.916.010,15	41.189.675.403,29	5.401.126.036,29						32.923.639.586,00	
02.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							35.788.549.367,00	36.223.916.010,15	41.189.675.403,29	5.401.126.036,29						32.923.639.586,00	
02.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Sekretariat Dishub				83 Nilai	83 Nilai	9.214.502.684,00	9.135.817.245,58	9.905.218.665,11	690.715.981,11						9.697.988.720,00	
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	4.966.948,00	4.966.948,00	3.467.581,80	(1.499.366,20)			-	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	-	5.000.000,00	
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup			
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	2.498.144,00	2.498.144,00	1.703.061,90	(795.082,10)						2.500.000,00	
2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup			
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	2.468.804,00	2.468.804,00	1.764.519,90	(704.284,10)						2.500.000,00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
2.15.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	6.047.090.950,00	6.047.090.950,00	6.807.007.347,80	759.916.397,80			04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Layanan administra si keuangan		6.527.704.946,00	
2.15.01.2.02. 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup				
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				39 Orang/ bulan	45 Orang/ bulan	6.045.103.666,00	6.045.103.666,00	6.805.825.164,00	760.721.498,00						6.525.204.946,00	
2.15.01.2.02. 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup				
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifik asi Keuangan SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	1.987.284,00	1.987.284,00	1.182.183,80	(805.100,20)						2.500.000,00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
2.15.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	408.568.826,00	329.883.387,58	340.867.775,51	(67.701.050,49)			-	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	-		408.404.462,00
2.15.01.2.06. 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup			
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	1 Paket	8.002.557,00	8.002.557,00	8.002.557,00	0,00						8.004.462,00	
2.15.01.2.06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup			
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				11 Paket	7 Paket	103.166.679,00	103.161.240,58	105.866.272,26	2.699.593,26						105.000.000,00	
2.15.01.2.06. 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup			
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.999.590,00	9.999.590,00	7.956.480,00	(2.043.110,00)						10.000.000,00	
2.15.01.2.06. 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup			
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00							2.400.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
2.15.01.2.06. 0007	Penyediaan Bahan/Material											Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup			
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	17.947.466,25	2.947.466,25							13.000.000,00
2.15.01.2.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup			
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				190 Laporan	190 Laporan	270.000.000,00	191.320.000,00	198.695.000,00	(71.305.000,00)							270.000.000,00
2.15.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	100 %	2.443.875.960,00	2.443.875.960,00	2.443.875.960,00	-			-	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	-		2.444.879.312,00
2.15.01.2.08. 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	151.500.000,00	151.500.000,00	151.500.000,00	0,00							151.500.000,00
2.15.01.2.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.292.375.960,00	2.292.375.960,00	2.292.375.960,00	0,00							2.293.379.312,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
2.15.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	100 %	310.000.000,00	310.000.000,00	310.000.000,00	0,00			-	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	-		312.000.000,00
2.15.01.2.09. 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup			
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	31.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00							31.000.000,00
2.15.01.2.09. 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup			
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	9 Unit	259.000.000,00	259.000.000,00	259.000.000,00	0,00							259.000.000,00
2.15.01.2.09. 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup			
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	47 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00							22.000.000,00
2.15.01.2.09. 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup			
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha blitasi				1 Unit	1 Unit	-	-	-	0,00							-

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
02.15.02	PROGRAM PENYELENGGARA AN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Indeks Kelancaran Lalulintas Persentase prasarana perhubungan				0.35 66.7 Nilai %	0.35 66.7 Nilai %	26.574.046.683,00	27.088.098.764,57	31.284.456.738,18	4.710.410.055,18						23.225.650.866,00	
2.15.02.2.01.	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Prosentase Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Tanah Laut	-			100 %	100 %	100.000.000,00	-	-	(100.000.000,00)			-	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	-	-	
2.15.02.2.01. 0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota											Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup			
		Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	-	-	(100.000.000,00)						-	
2.15.02.2.02.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan perlengkapan janlan di jalan kabupaten Tanah Laut	-			63.60 %	63.60 %	25.219.900.356,00	25.701.862.221,49	29.767.279.976,76	4.547.379.620,76			-	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	-	21.803.275.986,00	
2.15.02.2.02. 0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota											Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) PBUT- Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	-	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup			
		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				327 Unit	719 Unit	25.107.232.356,00	25.590.094.221,49	29.656.591.976,76	4.549.359.620,76							21.683.275.986,00
2.15.02.2.02. 0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan											Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup			
		Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				3 Unit	3 Unit	112.668.000,00	111.768.000,00	110.688.000,00	(1.980.000,00)							120.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
2.15.02.2.06.	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase ruas jalan kabupaten yang dilakukan manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	-			46.85 %	46.85 %	352.488.211,00	509.741.837,08	566.196.455,42	213.708.244,42			-	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	-		410.374.880,00
2.15.02.2.06. 0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota											Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup			
		Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	249.999.583,00	423.963.135,00	365.276.253,00	115.276.670,00							250.000.000,00
2.15.02.2.06. 0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota											Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup			
		Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				6 Laporan	6 Laporan	9.000.000,00	9.000.000,00	14.160.000,00	5.160.000,00							10.374.880,00
2.15.02.2.06. 0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota											Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup			
		Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provi nsi				12 Laporan	12 Laporan	93.488.628,00	76.778.702,08	186.760.202,42	93.271.574,42							150.000.000,00
2.15.02.2.07.	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase dokumen andalalin yang diterbitkan	-			100 %	100 %	83.174.116,00	65.127.116,00	54.308.558,00	(28.865.558,00)			-	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	-		112.000.000,00
2.15.02.2.07. 0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin											Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan,	PENDAPA TAN ASLI	-	04. Peningkatan Pelayanan			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				15 Laporan	15 Laporan	24.918.116,00	18.003.116,00	15.831.558,00	(9.086.558,00)	Semua Kel/Desa	DAERAH (PAD)		Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup		40.000.000,00	
2.15.02.2.07.0005	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin											Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup			
		Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi				2 Orang	2 Orang	39.911.000,00	34.064.000,00	27.237.000,00	(12.674.000,00)					40.000.000,00		
2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin											Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup			
		Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi				8 Laporan	8 Laporan	18.345.000,00	13.060.000,00	11.240.000,00	(7.105.000,00)					32.000.000,00		
2.15.02.2.09.	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah angkutan umum untuk angkutan orang yang tersedia	-			6 unit	6 unit	818.484.000,00	811.367.590,00	896.671.748,00	78.187.748,00			-	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	-	900.000.000,00	
2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota											Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup			
		Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				6 Unit	8 Unit	818.484.000,00	811.367.590,00	896.671.748,00	78.187.748,00					900.000.000,00		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)
	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor							5.219.107.837,00	5.152.507.837,00	243.132.753,88	(4.975.975.083,12)					220.000.000,00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.219.107.837,00	5.152.507.837,00	243.132.753,88	(4.975.975.083,12)					220.000.000,00	
02.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							5.219.107.837,00	5.152.507.837,00	243.132.753,88	(4.975.975.083,12)					220.000.000,00	
02.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Sekretariat Dishub				83 Nilai	83 Nilai	24.993.349,00	24.993.349,00	19.883.192,48	(5.110.156,52)					25.000.000,00	
2.15.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	24.993.349,00	24.993.349,00	19.883.192,48	(5.110.156,52)			04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	-	25.000.000,00	
2.15.01.2.06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.998.742,00	14.998.742,00	11.894.328,23	(3.104.413,77)					15.000.000,00	
2.15.01.2.06. 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.994.607,00	9.994.607,00	7.988.864,25	(2.005.742,75)					10.000.000,00	
02.15.02	PROGRAM PENYELENGGARA AN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Indeks Kelancaran Lalulintas Persentase prasarana perhubungan				0.35 66.7 Nilai %	0.35 66.7 Nilai %	5.194.114.488,00	5.127.514.488,00	223.249.561,40	(4.970.864.926,6 0)					195.000.000,00	
2.15.02.2.05.	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang terlayani	-			75 %	75 %	5.194.114.488,00	5.127.514.488,00	223.249.561,40	(4.970.864.926,6 0)			-	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan	-	195.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
														Lingkungan Hidup				
2.15.02.2.05. 0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor											Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Ambungan	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	4.994.114.488,00	4.927.514.488,00	23.249.561,40	(4.970.864.926,6 0)							
2.15.02.2.05. 0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor											Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup			
		Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1800 Dokumen	1800 Dokumen	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00						45.000.000,00	
2.15.02.2.05. 0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor											Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				12 Unit	12 Unit	155.000.000,00	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00						150.000.000,00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)
	UPTD Terminal dan Perparkiran							621.852.744,00	793.144.897,34	1.568.291.579,73	946.438.835,73						860.000.000,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							621.852.744,00	793.144.897,34	1.568.291.579,73	946.438.835,73						860.000.000,00
02.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							621.852.744,00	793.144.897,34	1.568.291.579,73	946.438.835,73						860.000.000,00
02.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Sekretariat Dishub				83 Nilai	83 Nilai	92.944.727,00	84.738.892,96	85.298.306,64	(7.646.420,36)						85.000.000,00
2.15.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administarsi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	92.944.727,00	84.738.892,96	85.298.306,64	(7.646.420,36)			-	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	-	85.000.000,00
2.15.01.2.06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Desa Ambungan	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-			
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	22.993.627,00	14.787.792,96	15.304.706,64	(7.688.920,36)				04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup		
2.15.01.2.06. 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Desa Ambungan	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	69.951.100,00	69.951.100,00	69.993.600,00	42.500,00						
02.15.02	PROGRAM PENYELENGGARA AN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Indeks Kelancaran Lalulintas Persentase prasarana perhubungan				0.35 66.7 Nilai %	0.35 66.7 Nilai %	528.908.017,00	708.406.004,38	1.482.993.273,09	954.085.256,09						775.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
2.15.02.2.03.	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase sarana dan prasarana terminal tipe C yang memenuhi standar	-			25 %	25 %	497.988.017,00	489.567.557,38	774.954.826,09	276.966.809,09			-	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	-		525.000.000,00
2.15.02.2.03. 0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang											Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Desa Ambungan	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup			
		Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang				2 Unit	2 Unit	497.988.017,00	489.567.557,38	774.954.826,09	276.966.809,09							500.000.000,00
2.15.02.2.03. 0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)											Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Desa Ambungan	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup			
		Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara				1 Unit	1 Unit	-	-	-	0,00							25.000.000,00
2.15.02.2.04.	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	-			66.6 %	66.6 %	30.920.000,00	218.838.447,00	708.038.447,00	677.118.447,00			-	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	-		250.000.000,00
2.15.02.2.04. 0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota										0,00	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Desa Ambungan	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah		
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	30.920.000,00	218.838.447,00	708.038.447,00	677.118.447,00						250.000.000,00
	UPTD Pelabuhan dan Penyeberangan							1.172.206.233,00	1.172.123.233,00	500.881.496,55	(671.324.736,45)						55.000.000,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.172.206.233,00	1.172.123.233,00	500.881.496,55	(671.324.736,45)						55.000.000,00
02.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							1.172.206.233,00	1.172.123.233,00	500.881.496,55	(671.324.736,45)						55.000.000,00
02.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Sekretariat Dishub				83 Nilai	83 Nilai	18.498.424,00	18.498.424,00	16.639.497,27	(1.858.926,73)						25.000.000,00
2.15.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	18.498.424,00	18.498.424,00	16.639.497,27	(1.858.926,73)			-	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	-	25.000.000,00
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Panyipatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13.498.669,00	13.498.669,00	12.669.763,10	(828.905,90)					15.000.000,00	
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Panyipatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.999.755,00	4.999.755,00	3.969.734,17	(1.030.020,83)					10.000.000,00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)
02.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Lintas Penyeberangan dan Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten				100 %	100 %	1.153.707.809,00	1.153.624.809,00	484.241.999,28	(669.465.809,72)						30.000.000,00
2.15.03.2.07.	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	29.970.000,00	29.887.000,00	29.887.000,00	(83.000,00)		-	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	-		30.000.000,00
2.15.03.2.07. 0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota											Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Panyipatan	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-			
		Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	29.970.000,00	29.887.000,00	29.887.000,00	(83.000,00)						



Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
2.15.03.2.13.	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	-			100 %	100 %	1.123.737.809,00	1.123.737.809,00	454.354.999,28	(669.382.809,72)			-	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	-		-
2.15.03.2.13. 0006	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau											Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Tanjung Dewa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup			
		Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan				1 Unit	1 Unit	1.123.737.809,00	1.123.737.809,00	454.354.999,28	(669.382.809,72)						-	
Jumlah Anggaran Keseluruhan								42.801.716.181,00	43.341.691.977,49	43.501.981.233,45	700.265.052,45							34.058.639.586,00

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perubahan SKPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut disusun sebagai panduan dan pedoman untuk pelaksanaan kegiatan/program/kebijaksanaan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut.

Penyusunan Renja-Perubahan SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut ini didasarkan pada :

1. Kondisi yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut
2. Semua unit kerja yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut
3. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 – 2026 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Tanah Laut.
4. Arahan dari pimpinan instansi (Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut)
5. Berprinsip Dinamis yaitu siap mengikuti perubahan baik internal maupun eksternal.

Pelaihari, 25 Juni 2025

Kepala Dinas,


DANCE SULAIMAN,SH
NIP. 19801125 200212 1 003

LAMPIRAN

✓ **Pernyataan hasil reviu**



DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANAH LAUT



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT INSPEKTORAT

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Telp (0512) 22384 Pelaihari

Pelaihari, 18 Juni 2025

Nomor : 700.1.2.1/128-LHR/Insp/2025 Kepada:
Lampiran : Catatan Hasil Reviu Yth. Kepala Dinas Perhubungan
Perihal : Laporan Hasil Reviu Terhadap Kabupaten Tanah Laut
Rancangan Akhir Perubahan
Renja Tahun 2025 di-
Pelaihari

I. RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan pemerintah daerah terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan serta untuk menjamin kualitas dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan, maka perlu dilaksanakan reviu terhadap Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

Reviu terhadap Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Anggaran Daerah Tahunan, surat Bupati Tanah Laut Nomor 000.7.3/1300/P2EPD/Bapperida tanggal 13 Juni 2025 perihal Permintaan Dokumen Perubahan Renja SKPD TA. 2025, serta Surat Perintah Tugas Plt. Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 800.1.11.1/248/Insp/2025 tanggal 17 Juni 2025 untuk melaksanakan reviu atas Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

II. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;
 11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Tahun Anggaran 2025;
 12. Surat Bupati Tanah Laut Nomor 000.7.3/1300/P2EPD/Bapperida tanggal 13 Juni 2025 perihal Permintaan Dokumen Perubahan Renja SKPD TA. 2025;
 13. Surat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Nomor 900.1.1.4/254/RencKeu/2025 tanggal 16 Juni 2025 perihal Penyampaian Permohonan Reviu Rancangan Akhir Renja Tahun 2025;
 14. Surat Perintah Tugas Plt. Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 800.1.11.1/248/Insp/2025 tanggal 17 Juni 2025 untuk melaksanakan reviu atas Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

III. GAMBARAN UMUM

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang memuat arah kebijakan dan rencana pelaksanaan program pembangunan daerah yang berkesinambungan pada perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun,

yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja Perangkat Daerah memuat:

1. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah tahun sebelumnya;
2. Tujuan, sasaran, target dan indikator kinerja perangkat daerah;
3. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan;
4. Kerangka pendanaan.

IV. TUJUAN REVIU

Tujuan pelaksanaan reviu terhadap Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 telah disusun dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2025 serta peraturan terkait lainnya dalam penyusunan Perubahan Renja.

V. RUANG LINGKUP REVIU

Ruang lingkup reviu adalah pengujian terbatas atas penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, yang mencakup aspek kesesuaian dengan dokumen perencanaan lainnya. Reviu ini tidak mencakup pengujian atas sistem pengendalian intern yang umumnya dilakukan dalam suatu audit.

Adapun ruang lingkup reviu meliputi:

1. Kelengkapan dokumen;
2. Kesesuaian tujuan dan sasaran dalam Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan sasaran dalam Perubahan RKPD Tahun 2025;
3. Kesesuaian pencantuman target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025;
4. Kesesuaian tujuan dan sasaran, program dan kegiatan dalam Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah;
5. Kesesuaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan dalam mendukung kinerja Program dalam Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;
6. Kesesuaian sistematika penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

VI. METODOLOGI REVIU

Reviu terhadap Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dilaksanakan melalui penelaahan kesesuaian dengan dokumen perencanaan lainnya, yaitu Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD Tahun 2025.

VII. URAIAN HASIL REVIU

Hasil reviu terhadap Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 dituangkan pada **Catatan Hasil Reviu** (terlampir).

VIII. APRESIASI

Kami memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut beserta seluruh tim penyusun atas terselesaikannya Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2025 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.



Plt. Inspektur
Kabupaten Tanah Laut,

Hj. RIVA MAHRANI, ST., CGCAE

Pembina (IV/a)

NIP. 19770223 200604 2 009

Lampiran Laporan Hasil Reviu

Nomor : 700.1.2.1/128-LHR/Insp/2025

Tanggal : 28 Juni 2025

**CATATAN HASIL REVIU
RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025**

Inspektorat Kabupaten Tanah Laut	Disusun oleh/ Tanggal	Nama Pereviu 18 Juni 2025
	Diteliti dan disetujui oleh/ Tanggal	Hj. Riva Mahrani, ST., CGCAE 18 Juni 2025
Catatan Hasil Reviu Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025.		

Berdasarkan Surat Tugas Plt. Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 800.1.11.1/248/Insp/2025 tanggal 17 Juni 2025 untuk melaksanakan reviu atas Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan catatan hasil reviu terhadap Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025.

A. Data Umum

Berdasarkan Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025, diperoleh informasi sebagai berikut:

1. Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025

Berdasarkan Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025, dapat diketahui bahwa tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 dijabarkan sebagai berikut:

- 1.1 Tujuan **“Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas”** dengan sasaran **“Meningkatnya Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas”** dan **“Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum.”**
- 1.2 Tujuan **“Meningkatkan akuntabilitas kinerja internal Pemerintah Daerah”** dengan sasaran **“Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.”**

2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berdasarkan Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025, dapat diketahui bahwa Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- 2) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- 5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material;
- 6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan;
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya;
- 4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

b) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

1. Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

- 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota.

2. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota;
- 2) Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan.

3. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

- 1) Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota;
- 2) Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota;
- 3) Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.

4. Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota

- 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin;
- 2) Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin;
- 3) Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin.

5. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

6. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

7. Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

- 1) Sub Kegiatan Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C Yang Dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang.

8. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

- 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota.

c) Program Pengelolaan Pelayaran

1. Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota;

2. Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau

1) Sub Kegiatan Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau.

B. Catatan Hasil Reviu

1) Kesesuaian Tujuan dan Sasaran Dalam Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan Sasaran dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025

Berdasarkan reviu yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa tujuan dan sasaran dalam Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 telah sesuai dengan sasaran dalam Perubahan RKPD Tahun 2025.

2) Kesesuaian Pencantuman Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dalam Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dalam Perubahan RKPD Tahun 2025

Berdasarkan reviu yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa **terdapat ketidaksesuaian** antara target kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 dengan target kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dalam Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2025	Target Kinerja Dalam Perubahan RKPD Tahun 2025
1	2	3	4	5
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	IKM sekretariat Dishub	-	83 Nilai
2.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100%
3.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Indeks KelancaranLalulintas	-	0,35 Nilai
		Persentase prasaranan perhubungan	-	66.7%

1	2	3	4	5
4.	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten Tanah Laut	-	63,6%
5.	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang terlayani	-	75%
6.	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase sarana dan prasarana terminal tipe C yang memenuhi standar	-	25%
7.	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	-	66,6%
8.	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Lintas Penyeberangan dan Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten	-	100%

3) Kesesuaian Tujuan dan Sasaran, Program dan Kegiatan Dalam Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan reviu yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa tujuan dan sasaran, program dan kegiatan dalam Bab III Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 telah didasarkan pada isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah sebagaimana disebutkan dalam Bab II Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025.

4) Kesesuaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan Dalam Mendukung Kinerja Program Dalam Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

Berdasarkan reviu yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa **masih terdapat** kinerja Kegiatan dalam Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 yang tidak mendukung Program dalam Rancangan Akhir Perubahan Renja dan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

No.	Kegiatan	Target Kinerja	Keterangan
1	2	3	4
1.	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-	Target kinerja pada Perubahan Renja kosong (tidak mendukung kinerja program)
2.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	Target kinerja pada Perubahan Renja kosong (tidak mendukung kinerja program)
3.	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	Target kinerja pada Perubahan Renja kosong (tidak mendukung kinerja program)

1	2	3	4
4.	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	-	Target kinerja pada Perubahan Renja kosong (tidak mendukung kinerja program)
5.	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	-	Target kinerja pada Perubahan Renja kosong (tidak mendukung kinerja program)

5) Kesesuaian Sistematisa Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Berdasarkan revidi yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa sistematisa penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan sistematisa penyusunan Renja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yakni sebagai berikut:

- a. Dalam BAB II Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2025 tidak memuat:
 - (1) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
 - (2) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
 - (3) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut;
 - (4) Tabel T-C.29;
 - (5) Review terhadap Rancangan Awal RKPD.
- b. Dalam BAB III Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2025 tidak memuat:
 - (1) Program Kegiatan (dimasukkan ke dalam BAB IV).
- c. Dalam BAB V Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2025 tidak memuat:
 - (1) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
 - (2) Kaidah-kaidah pelaksanaan.

C. Rekomendasi

Sehubungan dengan hasil revidi tersebut, kami memberikan rekomendasi kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut untuk melakukan perbaikan terhadap dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2025 sebagai berikut:

- 1) Mengisi target kinerja program dan kegiatan dalam Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2025 yang belum terisi, sesuai dengan target kinerja dalam Perubahan RKPD Tahun 2025;
- 2) Menyempurnakan dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2025 dengan melengkapi uraian pembahasan sesuai dengan sistematika penyusunan Renja.

Pelaihari, 18 Juni 2025

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Tanah Laut,

DANOË SULAIMAN, SH
NIP. 19801125 200212 1 003

Inspektur Pembantu I,

HJ. RIVA MAHRANI, ST., CGCAE
NIP. 19770223 200604 2 009